

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PERUMUSAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN DASAR KOTA YOGYAKARTA

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dilapangan dari data primer. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan proses perumusan strategi pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

Seluruh data yang terkumpul dari hasil penelitian di lapangan akan dipaparkan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, dengan tujuan agar analisa terhadap seluruh data yang diperoleh dapat diklasifikasikan dengan lebih sederhana dan digambarkan bentuk kata-kata sehingga lebih mudah dipahami.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan perubahan mendasar dalam konsep pembangunan kota, yakni melibatkan 3 (tiga) komponen utama : unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Namun permasalahannya adalah sejauh mana masyarakat, swasta, dan pemerintah bertekad, bersatu padu dan memiliki tanggung jawab bersama memajukan potensi pendidikan di kota Yogyakarta menjadi lebih unggul dalam persaingan, professional dan mandiri. Maka dari itu suatu pencapaian strategis

efektif, dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai dalam kebijakan pembangunan pendidikan terutama pendidikan dasar.

Dalam suatu rencana strategis pendidikan juga tidak terlepas dari adanya perencanaan yang berbasis kemampuan, kenyataan, dan kekinian. Kemampuan merujuk kepada tersedianya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang yang relevan dengan pekerjaannya disertai dengan berbagai karakteristik lainnya. Perencanaan strategis akan menampilkan pertimbangan-pertimbangan berbagai dimensi yang ada dalam suatu konteks tertentu, disamping juga memperhatikan berbagai kebijakan yang dijadikan pedoman berbagai kegiatan.

Perencanaan strategis pendidikan disamping bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi dan demokratis, peran aktif masyarakat, dan cermat melihat potensi serta keanekaragaman peluang dan kesempatan untuk bersaing dengan daerah lain. Oleh karena itu profesionalitas sangat mutlak diwujudkan guna menentukan bentuk pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya manusia.

• Landasan Hukum

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas maka Pemerintah kota Yogyakarta dalam merumuskan sebuah strategi, maka pelaksanaannya berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu:

- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah No.71 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- g. Peraturan daerah No.1 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007-2006.
- h. Peraturan Walikota No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2007-2011.

A. Analisis lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

1. Identifikasi Visi dan Misi

a. Visi

Melihat dari analisis internal dan eksternal , kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005 tentang Susuna Organisasi dan tata kerja

Dinas Pendidikan maka visi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah:

“Pendidikan berkualitas, berwawasan global dengan dukungan sumber daya manusia yang professional”

Melihat dari analisis internal dan eksternal , kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan maka visi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah :

“Pendidikan berkualitas, berwawasan global dengan dukungan sumber daya manusia yang professional.” Adapun yang dimaksud dengan pendidikan berkualitas adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standart kualitas yang tinggi, keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ), sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas juga ditunjukkan pada sistem pendidikannya, yaitu sejak input, proses, dan output juga memiliki kualitas. Pendidikan sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi sistem pendidikan yang memiliki kualitas yang lebih baik, termasuk tentunya pendidikan yang ada dikeluarga dan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan jalur pendidikan nonformal. Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk kursus , kelompok belajar masyarakat, dan sejenisnya. Kursus dapat diselenggarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun oleh

masyarakat. Sampai saat ini Kota Yogyakarta telah diketahui sebagai pusat Pendidikan Masyarakat yang mampu memberikan bekal keterampilan yang memadai. Namun demikian belum diketahui secara pasti pola , arah , bentuk dan jenis yang diadakan. Melalui rencana aksi daerah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diharapkan adanya penataan ulang kebijakan bidang pendidikan masyarakat serta pengembangannya agar dapat mengikuti perkembangan IPTEKS. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari tingkat pendidikan rendah, serta partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesionalisme yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mendorong kemandirian bangsa menuju bangsa yang adil. Menurut Undang – undang RI Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, untuk mencapai visi tersebut salah satunya dicapai melalui misi mewujudkan daya saing bangsa dengan cara memperkuat perekonomian domestic berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan di dalam negeri; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya asing; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya asing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju;serta reformasi dibidang hukum

1. Tujuan dan daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat

yang lebih makmur dan sejahtera, ditunjukkan oleh peningkatan kualitas SDM.

Pendidikan berkualitas sebagaimana amanah RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang memiliki standar kualitas yang tinggi, keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia(IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ), sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Tematik Kota Yogyakarta untuk Tahun 2009 lebih menekankan pembangunan di bidang pendidikan yaitu Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional. Berdasarkan tematik pembangunan tersebut, dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas dicapai melalui prioritas kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pokok

1. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Dan Menengah 12 Tahun Yang Berkualitas Dengan Biaya Yang Terjangkau;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek: lulusan, proses,

3. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual;
4. Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat;

2. Kebijakan Penunjang

1. Memanfaatkan tehnologi informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan
2. Meningkatkan wawasan kebangsaan, keamanan, ketertiban dan peran media komunikasi dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.
3. Meningkatkan peran generasi muda dalam mendukung keamanan, ketertiban dan persatuan.
4. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi.
5. Meningkatkan manajemen pembangunan.
6. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan.
7. Melakukan inovasi dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang tetap berlandaskan kepada wisata pendidikan, wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata konvresi

8. Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang diinginkan, maka Dinas Pendidikan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas yang berakar budaya adiluhung.
2. Mewujudkan pendidikan berwawasan global dan berbasis teknologi informasi.
3. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai.

Mewujudkan pendidikan berkualitas yang berakar budaya adiluhung disini adalah selain memiliki pendidikan yang berkualitas tetapi juga kita meningkatkan kualitas iman, takwa dan budi pekerti kita sebagai sumber daya manusia yang mempunyai kualitas pendidikan yang sangat baik. Hal ini sangat bermanfaat di kehidupan sosial kita sebagai sumber daya manusia yang berpendidikan karena kita memiliki budi pekerti yang luhur sebagai misi mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang berakar budiluhur. Mewujudkan pendidikan berwawasan global dan berbasis teknologi dan informasi disini adalah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan aman (PAIKEMA) berbasis pendekatan pembelajaran dan pengajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*)

Dalam strategi pembelajaran berorientasi kritis dikembangkan agar memberi

kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dalam arus pasar Global. Pendekatan dan strategi ini pada kemudiannya dipadukan dan dikembangkan dengan pendekatan *Informatics and Communication Technology* (ICT). Untuk pengembangan diri konteks kesantunan kerja diberikan pendidikan budi pekerti. Melalui multi pendekatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan diri secara optimal dan dapat mengikuti perkembangan IPTEKS yang berkembang eskalatif. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai adalah dengan cara meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satunya, sertifikasi pendidik. Program sertifikasi pendidik sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Pada tahun 2006, pendataan calon peserta sertifikasi guru Tahap I sudah dilakukan tetapi pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2007. Sertifikasi Tahap II dilakukan pada tahun 2007. Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi guru ditentukan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kuota untuk Kota Yogyakarta pada tahun 2006: 75 orang yang terdiri atas 59 guru SD dan 16 guru SMP, semuanya PNS. Kuota untuk Kota Yogyakarta tahun 2007 adalah 653 orang yang terdiri dari Guru TK (PNS 72, Non-PNS 18); Guru SD (PNS 122, Non-PNS 47); Guru SMP (PNS 110, Non-PNS 32); Guru SMA (PNS 110, Non-PNS 28); dan Guru SMK (PNS 91, Non-PNS 23). Bagi guru yang lolos dalam penjurangan, dilakukan penilaian 'lapangan' oleh Pengawas Sekolah dengan menilai pembelajaran yang dilakukan Guru saat mengajar dan Guru guru yang lolos

dalam penjurangan tersebut juga sudah mengumpulkan portofolio. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sertifikasi Guru Tahun 2007, persyaratannya adalah⁴²:

1. Sertifikasi berlaku untuk Guru PNS dan Guru Non-PNS;
2. Pendataan untuk sertifikasi bagi PNS ditentukan berdasarkan peringkat masa kerja Guru, usia, golongan, beban mengajar tugas-tugas yang dipegang/jabatan di sekolah, prestasi yang dimiliki.
3. Pendataan untuk sertifikasi bagi Guru Non-PNS ditentukan berdasarkan peringkat masa kerja Guru, usia, beban mengajar, berdasarkan peringkat masa kerja Guru, usia, beban mengajar, tugas-tugas yang dipegang/jabatan di sekolah, prestasi yang dimiliki.
4. Guru yang lolos pendataan mengumpulkan dokumen portofolio, termasuk hasil penilaian kompetensi mengajar oleh Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan.

Guru yang sudah hampir pensiun dan mengikuti seleksi sertifikasi Guru, diikutkan juga dalam sertifikasi Guru tersebut. Hal ini didasarkan atas persyaratan dan kriteria sebagaimana yang disampaikan di atas. Masa kerja adalah kriteria pertama dan usia adalah kriteria kedua, maka guru yang berusia lanjut tetap mendapatkan kesempatan awal. Sejalan dengan sertifikasi guru, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang

bekerja pada satuan-satuan pendidikan di Kota Yogyakarta, terutama pada satuan pendidikan negeri.⁴³

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan kearifan lokal.
2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, berorientasi global dengan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Melaksanakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai. Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan.

Penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi

landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan

Bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan pendidikan tahun 2010-2014 adalah sebagai

1) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses PAUD Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dicirikan dengan:

- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diharapkan dapat mewujudkan anak usia dini yang cerdas, sehat, bugar, ceria, berakhlak mulia, dan berwawasan PuP3B sesuai dengan karakteristik dan tahap tumbuh kembang anak, serta memiliki kesiapan fisik dan mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b) Pada tahun 2014 diharapkan APK PAUD nasional mencapai 72,9%, sekurang-kurangnya 75% provinsi mencapai $APK \geq 60\%$, sekurang-kurangnya 75% kota mencapai $APK \geq 75\%$, dan sekurang-kurangnya 75% kabupaten mencapai $APK \geq 50\%$;
- c) Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55% pada tahun 2014.⁴⁴

2) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Dasar Universal Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berindikasikan sebagai berikut.

1. APK SD/MI/Paket A nasional mencapai 119,1%;

⁴⁴ RPJM Kota Yogyakarta tahun 2007-2011

2. APM SD/MI/Paket A nasional mencapai 96%; sekurang-kurangnya 85% provinsi mencapai
3. APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%; sekurang-kurangnya 90% provinsi mencapai $APK \geq 95\%$; sekurang-kurangnya 80% kota mencapai $APK \geq 115\%$, dan sekurang-kurangnya 85% kabupaten mencapai $APK \geq 90\%$;
4. Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan
5. SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%;
6. Hasil ujian nasional SD/SDLB dan SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 7 selama 5 tahun berturut-turut;
7. Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB berakreditasi;
8. Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB dan 27% SMP/SMPLB berakreditasi minimal B;
9. Sekurang-kurangnya 60% SD/SDLB dan 70% SMP/SMPLB melaksanakan PuP3B;
10. Sekurang-kurangnya 40% program Paket A dan 40% program Paket B berakreditasi;
11. Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran;
12. Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau

13. Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI;
14. Sekurang-kurangnya 85% kota memiliki 2 SMP SBI atau RSBI;
15. Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat;
16. Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;
17. Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB Sekurang-kurangnya 80% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB telah menerapkan KTSP dengan Negeri berstandar pelayanan minimal sampai dengan berstandar nasional diselenggarakan tanpa memungut biaya operasi sekolah dan yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di SD/SDLB dan SMP/SMPLB swasta yang mendapatkan subsidi BOS tidak lagi memungut biaya operasional sekolah yang memberatkan peserta didik; Tidak ada lagi lembaga penyelenggara Paket A dan Paket B memungut biaya pendidikan:
18. Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB telah

3) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Menengah Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berindikasikan sebagai berikut:

1. APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi mencapai APK minimal
2. Rasio peserta didik SMA:SMK = 33:67;
3. Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B;
4. Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B;
5. Sekurang-kurangnya 80% SMA/SMLB/SMK melaksanakan PuP3B;
6. Sekurang-kurangnya 50% program Paket C dan 25% program Paket C Kejuruan berakreditasi;
7. Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran;
8. Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA/SMLB dan SMK SBI atau RSBI;
9. Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;

11. Sekurang-kurangnya 1.500 SMA/SMLB dan 2.000 SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
12. Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB dan 85% SMK telah menerapkan KTSP dengan baik.⁴⁶

4) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara yang berindikasikan sebagai berikut.

1. APK PT dan PTA usia 19-22 tahun mencapai 30%; dan APK prodi sains natural dan teknologi sebesar 12%;
2. Sertifikat ISO 9001:2008 yang diperoleh PTN sebanyak 450 sertifikat dan yang diperoleh PTS sebanyak 600 sertifikat;
3. Sekurang-kurangnya 27 PT memiliki laboratorium sains bersertifikat ISO 17025;
4. Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi minimal B;
5. Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 7 PT(kumulatif) masuk dalam peringkat 500 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES;
6. Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2;

⁴⁶ RPJM Kota Yogyakarta tahun 2007-2011

7. Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3;
8. Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat;
9. Sekurang-kurangnya 70% PT berakses e-journal;
10. Sekurang-kurangnya 50% Dosen PT melakukan publikasi nasional dan sekurang-kurangnya 6,5% dosen pasca sarjana melakukan publikasi internasional;
11. Jumlah HAKI yang dihasilkan sekurang-kurangnya 150;
12. Sekurang-kurangnya 37 PTN berbadan hukum beropini WTP, dan 200 PTS BHPM beropini WTP;
13. Persentase mahasiswa vokasi terhadap total mahasiswa diploma dan sarjana sekurang kurangnya 30%;
14. Sekurang-kurangnya 60 PTN menjadi BHPP dan 600 PTS menjadi BHPM.⁴⁷

5) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat yang berindikasikan sebagai berikut.

1. Tingkat literasi nasional penduduk usia ≥ 15 tahun mencapai 98%, 95% provinsi mencapai
2. tingkat literasi > 95%, 95% Kota mencapai tingkat literasi > 95%, dan 85% kabupaten mencapai tingkat literasi > 95%;

⁴⁷ RPJM Kota Yogyakarta tahun 2007-2011

3. Sekurang-kurangnya 30% anak remaja usia 16-20 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan mengikuti pendidikan kesetaraan dan/atau pendidikan kecakapan hidup;
4. Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi;
5. Sekurang-kurangnya 90% kabupaten dan kota memiliki SKB;
6. Sekurang-kurangnya 80% kecamatan memiliki PKBM dan TBM;
7. Sekurang-kurangnya 25% PKBM berakreditasi;
8. Sekurang-kurangnya 70% Tutor pendidik keaksaraan mengikuti PPB;
9. Sekurang-kurangnya 55% pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi;
10. Sekurang-kurangnya 20% pemegang SUKMA menempuh PKH;
11. Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;⁴⁸

6) Terwujudnya Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Sistem Pengawasan Intern yang berindikasikan:

1. Opini audit BPK RI atas laporan keuangan Depdiknas adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut;

2. Sikas I AKIP Depdiknas menurut penilaian Mennan sekurang-kurangnya

3. Semua satker eselon IIA dan UPT pusat mempraktekkan pelayanan prima bersertifikasi ISO9001:2008;
4. Semua satker Depdiknas menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja (MBK);
5. Rerata hari kerja efektif pegawai Depdiknas mencapai 237 hari pertahun;
6. Hampir semua satker melaksanakan e-administrasi;
7. Semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersertifikat PBJ;
8. Semua satker Eselon II Depdiknas memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Penetapan sasaran peningkatan keluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota akan memberikan efek resultan pada peningkatan APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%.⁴⁹

b. Sasaran

1. Terlaksananya pembelajaran yang mengakomodasi muatan lokal.
2. Terlaksananya pembelajaran holistic dan berbasis teknologi informasi.
3. Diperolehnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

c. Kebijakan

1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau.
2. Meningkatkan kualitas ketenagaan, manajemen kelembagaan, sarana prasarana.
3. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan aspek intelektual, emosional, spiritual.
4. Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran

3. Analisis SWOT

Analisis SWOT pada dasarnya secara efektif dapat membantu menstrukturkan masalah dengan menganalisis berbagai lingkungan internal dan eksternal. Melalui empat unsure yang selalu dihadapi dan dimiliki oleh suatu organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta secara internal memiliki sejumlah kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknes) dan secara internal dengan berbagai peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Sehingga dalam analisis SWOT ini juga memiliki asumsi bahwa strategi yang efektif adalah strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Ada pun unsur kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta antara lain:

1. Telah ditetapkannya struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 71 tahun 2008.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 71 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta maka akan diketahui kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan kewenangan dalam bidang pendidikan, sehingga masing- masing anggota organisasi dapat menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada.

Efektivitas dan efisiensi yang didapat dari ditetapkannya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan kota Yogyakarta tersebut adalah sebagai pedoman dalam menganalisis anggota organisasi agar kinerjanya optimal sehingga dalam Dinas tidak kekurangan Sumber Daya Manusia yang menyebabkan kerja ganda.

2. Adanya Dukungan Dana dari Pemerintah

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki alokasi dana BOS tahun 2011 sebesar Rp 31.000.000.000,00 .⁵⁰ Total dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta di Kota Yogyakarta adalah Rp 31 miliar yang akan dicairkan dalam tiga tahapan dengan masing-masing tahapan sebesar Rp 7,8 miliar. Pada termin

pertama, total dana BOS untuk sekolah negeri yang telah dicairkan adalah Rp 3,8 miliar dan sisanya adalah dana BOS untuk sekolah swasta. “Jumlah dana yang diterima oleh sekolah swasta memang lebih besar dibanding sekolah negeri karena penerimaan dana BOS tersebut didasarkan pada jumlah siswa. Dana BOS dari tahun sebelumnya dinaikan rata-rata 50%, jadi dana BOS SD tahun 2009/2010 menjadi Rp. 397.000, 00 untuk Kabupaten dan Rp.400.000,00 untuk Kota/Siswa/Tahun dari yang sebelumnya SD sebesar Rp.254.000,00 /Siswa/Tahun. Sementara BOS SMP tahun 2009/2010 adalah sebesar Rp.570.000,00 untuk Kabupaten dan Rp.575.000,00 untuk Kota per Siswa/Tahun. Pemerintah Kota wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD masing-masing jika BOS belum cukup menggratiskan siswa SD dan SMP negeri.⁵¹

Pendanaan dana BOS SD Negeri Rp 400.000,00 / anak/ tahun.sedangkan BOSDA Kota Rp. 150.000,00/ anak/ tahun dan untuk BOSDA Provinsi Rp. 100.000,00/ anak/ tahun. Pendanaan BOS SMP Negeri Rp.575.000,00/ anak/ tahun dana BOS tersebut berasal dari dana BOS Pusat, sedangkan dana BOS KOTA Rp. 625.000/anak/tahun. Jadi jumlah dana BOS untuk SD Rp. 650.00/ anak/tahun dan dana BOS untu SMP Rp. 1.200.000,00 /anak/tahun. Untuk sekolah swasta dana BOS sama dengan sekolah negeri tetapi dana BOSDA

berbeda untuk SD Rp. 75.000/anak/tahun dan SMP Rp. 150.000,00/ anak/tahun karena sekolah swasta masih ada tambahan biaya dari SPP dan KOMITE.⁵²

Pendanaan terutama berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Yogyakarta diharapkan tidak merupakan kendala dalam pelaksanaan RAD ini, sehingga perlu dibuat skala prioritas. Skala prioritas ini dipilih untuk program/kegiatan

yang mempunyai kontribusi besar dalam rangka mencapai tujuan rencana

aksi yang telah ditetapkan. Namun demikian untuk lebih mensukseskan pelaksanaan dan pencapaian tujuan perlu diusahakan anggaran baik dari Pemerintah pusat maupun pemerintah Propinsi DIY. Anggaran yang berasal dari APBN maupun APBD Propinsi DIY dapat dilakukan dengan mengusulkan anggaran baik lewat mekanisme yang ada yaitu Musrenbang Tingkat Pusat dan Musrenbang Tingkat Propinsi DIY, maupun usulan langsung kepada departemen terkait/pemerintah propinsi melalui program-program yang ada pusat maupun propinsi. Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas memerlukan dukungan penganggaran yang tidak hanya berasal dari anggaran daerah, propinsi, dan pusat, akan tetapi juga diusahakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan lembaga-lembaga donor, swasta dan masyarakat.⁵³

• Kelemahan (Weakness)

⁵² Wawancara dengan bapak Drs. Sugeng Mulyo Subono, Bidang Pendidikan Dasar dan TK. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Tanggal 04 April 2011.

⁵³ RPJM Kota Yogyakarta tahun 2007-2011

Unsur kelemahan (Weakness) yang dimiliki oleh dinas pendidikan Kota Yogyakarta antara lain:

1. Terbatasnya tenaga pendidik dan pendidik yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai

Kualitas Sumber Daya Manusia tenaga pendidik belum semuanya professional, hal ini dapat dilihat bahwa belum semua guru dapat melaksanakan tugasnya dengan benar , karena belum semua tenaga pengelola pendidikan memiliki jenjang pendidikan yang berkualifikasi minimal. Keadaan seperti inilah yang membuat pendidikan di Kota Yogyakarta menghasilkan mutu pendidikan yang kurang optimal.⁵⁴ Sertifikasi dan peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, akreditasi sekolah, standarisasi sarana prasarana

Sasaran program:

Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat sebesar 90%, kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan meningkat 30 %, jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat sebesar 30% dan sarana prasarana yang memenuhi standar meningkat sebesar 30%.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai standar

Indikator sarana dan prasarana pendidikan adalah ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah yang ada. Namun pada umumnya sarana dan prasarana belum

dapat memenuhi standar pelayanan minimum, misalnya saja perpustakaan sekolah, ruang komputer dan laboratorium yang sangat dibutuhkan bagi para siswa untuk menunjang kegiatan belajar para siswa.⁵⁵

3. Penerapan manajemen mutu terpadu masih rendah.

Minimnya penerapan manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kelemahan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Melalui Otonomi Daerah Pemerintah memberikan kewenangan terhadap pembangunan dibidang pendidikan melalui peningkatan guru atau tenaga pendidikan untuk mewujudkan tenaga pendidikan professional. Selain peningkatan terhadap kualitas guru atau tenaga pendidik, Pemerintahan Kota Yogyakarta juga berusaha meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar yang diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar kota Yogyakarta.

⁵⁵ *Rencana Strategik (RENSTRA) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2007-2011.*

2. Predikat Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan.

Kota Yogyakarta yang disebut sebagai Kota Pendidikan dan Kota Pelajar menjadikan pemerintah kota Yogyakarta berusaha meningkatkan Mutu dan Kualitas pendidikan dari mulai tingkat dasar.berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk para siswa agar berminat dan mempunyai tingkat belajar yang sangat tinggi, serta meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan yang sangat baik.

3. Adanya Sumber Daya Pendukung Pendidikan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi maka masyarakat secara langsung dituntut dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berkembang. Maka kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang mendukung pendidikan semakin tinggi..sumber daya pendukung yang tinggi menjadi motivasi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap sumber daya pendukung pendidikan untuk dapat memperoleh pendidikan yang sangat baik.

b. Ancaman (Threat)

1. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum kondusif

Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat semakin banyaknya jumlah masyarakat dengan ekonomi lemah. Dengan kondisi ekonomi rendah maka masyarakat cenderung mengabaikan pendidikan anaknya, namun akan semakin komplis ketika biaya pendidikan semakin hari semakin

tinggi, maka apabila tidak di atasi maka jumlah anak putus sekolah akan semakin meningkat.

2. Adanya Kerawanan Sosial Masyarakat

Kenakalan remaja dan maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sebagai akibat dari globalisasi dikhawatirkan akan merusak generasi muda dan menghancurkan masa depan mereka. Apalagi hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan sumber Daya Manusia terutama anak usia sekolah dalam lingkungan sekitarnya yang menyebabkan kerawanan sosial masyarakat. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, oleh sebab itu diharapkan adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua para siswa untuk sama-sama mengawasi dan membimbing siswa agar terhindar dari segala bentuk pengaruh negatif dilingkungan sosialnya.

3. Belum adanya persamaan persepsi anantara pelaksana pendidikan dengan stakeholder dalam pengembangan pendidikan

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pengaruh perkembangan teknologi dan informasi tidak selamanya membawa dampak positif tapi juga dampak negative bagi masyarakat khususnya remaja usia sekolah. Disinilah peran stakeholder yaitu pemerintah.dinas pendidikan terutama mengawasi teknologi informasi yang akan disampaikan kepada para siswa agar tidak terjadi pengaruh negative yang menyebabkan turunya nilai budaya dan kehidupan masyarakat.dan peran orangtua

kegiatan para siswa diluar jam sekolah agar tidak terjadi pelanggaran peraturan dan kenalan remaja yang semakin tidak terkendali.

4. Ringkasan SWOT (SWOT summary)

Berangkat dari analisis yang dibangun melalui narasi tersebut diatas dalam kerangka berfikir manajemen strategi dan pengguna teknik analisis matriks SWOT, maka berikut ini disusun rangkuman SWOT (summary SWOT) dalam rangka Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar dengan studi pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dari analisis SWOT penentu keberhasilan ada 5 faktor yaitu:

1. Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai
2. Terpeliharanya komitmen dari aparatur Dinas Pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pendidikan
3. Terwujudnya penerapan manajemen mutu terpadu disemua jenis dan jenjang pendidikan
4. Tersedianya sumber daya pendukung pendidikan

5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

Tabel 3.1
Ringkasan Matriks SWOT

	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="558 1220 893 1850">1. Telah ditetapkan struktur organisasi dan tupoksi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 71 tahun 2008. <li data-bbox="558 1892 893 2070">2. Adanya dukungan dana dari pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="928 1220 1263 1398">1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai standar. <li data-bbox="928 1440 1263 1839">2. Terbatasnya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. <li data-bbox="928 1881 1263 2070">3. Penerapan manajemen mutu terpadu masih

	<p>3. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pendidikan.</p>	<p>rendah.</p>
<p>EKSTERNAL</p>	<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <p>2. Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan.</p> <p>3. Adanya sumber daya pendukung pendidikan.</p>	<p>Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <p>1. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum kondusif.</p> <p>2. Adanya kerawanan sosial masyarakat.</p> <p>3. Belum adanya persamaan persepsi antara pelaksana pendidikan dan <i>stake holder</i> dalam pengembangan pendidikan.</p>

Selanjutnya pemetaan instruksi faktor dengan cara memadukan faktor

dan faktor internal yang sudah diidentifikasi sebelumnya dengan

- a. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang merupakan interaksi antara kekuatan (S) dengan peluang (O) atau (SO) yang dapat menghasilkan keuntungan komparatif.
- b. Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi ancaman merupakan interaksi antara kekuatan (S) dengan ancaman (T) atau (ST) dapat menghasilkan upaya mobilisasi.
- c. Atasi kelemahan (W) dengan memanfaatkan (O) atau dengan meminimal ancaman. Kelemahan merupakan interaksi antara kelemahan (W) dengan peluang (O) hasilnya terdapat 2 kemungkinan pilihan yaitu melakukan sesuatu (investasi) atau tidak melakukan sesuatu (divertasi).
- d. Meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman merupakan interaksi antara kelemahan (W) dengan ancaman (T) atau (WT) untuk mempertahankan status quo.

B. Identifikasi implementasi Strategis

1. Implementasi strategis

Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal maupun internal telah diperoleh implementasi strategis yang bernilai strategis yang akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Adapun usulan-usulan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Matriks SWOT dan penjabaran isu strategi hasil penemuan

Dari keseluruhan hasil analisis yang dilakukan dengan bertolak pada teknik matriks SWOT dan penerapan alur berfikir manajemen strategi, maka dapat disusun isu-isu yang ditemukan, serta rangkuman strategi yang dapat diambil analisis teknik SWOT tersebut.

Berdasarkan pengkajian dan analisis terhadap fakta yang ada dan berdasarkan asumsi yang dibangun dari kerangka berfikir manajemen strategis, maka dapat diperoleh strategi- strategi yang tepat untuk digunakan dimasa mendatang dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar kota Yogyakarta .

Pada bagan berikut ini diperlihatkan secara menyeluruh hasil teknik analisis matriks SWOT baik faktor lingkungan eksternal untuk peluang dan ancaman, maupun factor lingkungan internal untuk kekuatan dan kelemahan, sekaligus hubungan antara dimensi-dimenasi tersebut dalam upaya memperoleh strategi yang tepat yang akan dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dalam mengantisipasi semua kemungkinan perkembangan lingkungan strategi yang ada, baik internal maupun eksternal.

Tabel 3.2

Matriks Analisis SWOT dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

INTERNAL	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	<p>1. ditetapkannya struktur organisasi dan tupoksi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 71 tahun 2008.</p> <p>2. Adanya dukungan dana dari pemerintah.</p>	<p>1. Terbatasnya tenaga kependidikan dan pendidik yang meiliki kompetensi dan kualifikasi yang</p> <p>2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai standar. pada siswa.</p> <p>3. Penerapan manajemen mutu terpadu masih rendah.</p>
EKSTERNA		
L		

Peluang (Opportunity)	Strategi S-O	Strategi W-O
<p>1. Adanya Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.</p> <p>2. Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan.</p> <p>3. Adanya sumber daya pendukung pendidikan.</p>	<p>1. Meningkatkan kinerja organisasi serta melibatkan seluruh potensi tenaga pendidik untuk memanfaatkan adanya komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan.</p> <p>2. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada dikota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas sumber daya pendukung agar dapat mempengaruhi kenaikan tingkat kualitas pendidikan di kota Yogyakarta.</p>	<p>1. Mengatasi rendahnya kualitas tenaga pendidik dengan memanfaatkan adanya beasiswa dan komitmen pemerintah kota Yogyakarta yang tinggi terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dengan memanfaatkan adanya otonomi daerah..</p>
	Strategi S-T	
	<p>1. Memanfaatkan dana APBD untuk mengatasi masalah pendidikan masyarakat</p>	

<p>Ancaman (Threat)</p> <p>4. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum kondusif.</p> <p>5. Adanya kerawana</p>	<p>ekonomi lemah akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kualitas sarana dan prasarana untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berguna menghadapi kehidupan sosial yang ada dimasyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama berbagai pihak terkait untuk meningkatkan perkembangan di dunia pendidikan.</p>	<p>Straregi W-T</p> <p>1. Meminimalkan jumlah tenaga pendidik yang kurang berkualitas serta sarana dan prasarana kurang</p>
---	---	--

<p>n sosial masyarakat at.</p> <p>3. Belum adanya persamaan persepsi antara pelaksana pendidikan dan <i>stake holder</i> dalam pengembang an pendidikan.</p>		<p>memadai dengan mengoptimal kan pengguna dana pendidikan.</p> <p>2. Tingkat disiplin dan kinerja tenaga pendidikan dengan meningkatkan n sistem pengawasan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berguna menghadapi kehidupan social yang</p>
--	--	---

		<p>ada dimasyarakat.</p> <p>3. Meminimalkan serta mengantisipasi pengaruh negatif perkembangan teknologi dan informasi dengan meningkatkan kerja sama guna memantau perkembangan anak usia sekolah.</p>
--	--	---

Ringkasan matriks SWOT tersebut diatas digunakan sebagai titik

pertemuan key faktor dari masing-masing lingkungan yang ada (internal maupun

external) dan diimplementasikan sebagai implementasi yang

Penjabaran ringkasan implementasi strategis hasil temuan analisis dan kajian teknik matriks SWOT adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi serta melibatkan seluruh potensi tenaga pendidik untuk memanfaatkan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
- b. Memanfaatkan dana yang cukup besar yang dialokasikan untuk pendidikan guna mengoptimalkan upaya kualitas pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas siswa dan tenaga pendidik dengan memanfaatkan adanya beasiswa atau dana BOS dari pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Memanfaatkan dana APBD untuk mengatasi masalah pendidikan masyarakat ekonomi lemah akibat krisis ekonomi yang belum kondusif.
- e. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas guna menghadapi kehidupan social dimasyarakat dan mampu menghadapi persaingan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.
- f. Meningkatkan kerjasama berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.
- g. Mengatasi rendahnya kualitas tenaga pendidik dengan

pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan..

- h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dengan memanfaatkan otonomi daerah.
- i. Meminimalkan jumlah tenaga pendidikan yang kurang berkualitas serta sarana dan prasarana kurang memadai dengan mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan.
- j. Tingkatkan disiplin dan kinerja tenaga pendidik dengan meningkatkan sistem pengawasan untuk menciptakan mutu sumber daya manusia yang berkualitas guna menghadapi persaingan di era globalisasi.

dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi serta seluruh potensi tenaga pendidikan, untuk memanfaatkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar.**

Peningkatan kinerja organisasi serta melibatkan seluruh potensi tenaga pendidik merupakan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan dalam melaksanakan pembaharuan serta peningkatan kualitas pendidikan.

Apalagi dalam peningkatan mutu pendidikan ujung pendidikan terletak pada guru atau tenaga pendidik, dalam hal ini keprofesionalan serta kemampuan tenaga pendidik sangat berpengaruh karena guru merupakan ujung tombak

dengan proses pembelajaran siswa. Dan pembinaan profesionalan guru merupakan alternative yang dipilih untuk meningkatkan kualitas yang berupa kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, pengabdian serta disiplin guru, sehingga dapat meningkatkan secara optimal kemampuan guru mengelola Kegiatan Belajar Mengajar(KBM).

Untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas dimasa depan, maka dituntut lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Rendahnya kualitas pendidikan biasanya disebabkan rendahnya kualifikasi dan kualitas guru, sehingga hal tersebut harus segera diatasi, sehingga pada akhirnya guru mampu berkompetensi secara professional berdasarkan kualifikasi yang dimiliki.

Hingga saat ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dibidang pendidikan dasar masih bertahap dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana strategis tahunan.. pelaksanaannya sudah berjalan berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan karena dalam Dinas Pendidikan kota Yogyakarta peningkatan mutu guru pendidikan dasar diselenggarakan dalam berbagai bentuk pelatihan/diklat guru atau kepala sekolah dan menyekolahkan guru atau kepala sekolah untuk program DII maupun Sarjana.

Dalam program peningkatan profesionalisme guru dana yang diperoleh dari anggaran APBN,APBD serta sumber dana lainnya. Dan apabila masalah dana tidak mencukupi dicari solusi lain seperti lewat Dewan Sekolah.

Dalam rangka meningkatkan dan mengatasi kualitas pengelola pendidikan yang belum professional dengan memanfaatkan adanya komitmen pemerintah Kota Yogyakarta yang tinggi terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik, maka strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yaitu:

- a. Meningkatkan kualifikasi dari berkualifikasi SPG atau sederajat menjadi berkualifikasi D-II atau D- II menjadi D-III melalui program izin dan tugas belajar, serta memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan S1 dan S2.
- b. Meningkatkan kemampuan keterampilan dan professional kinerja guru melalui diklat, penataran, seminar, dan kegiatan fungsional lainnya serta melalui pembinaan karier dan prestasi yang objektif professional.
- c. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap kelancaran administrasi kepegawaian guru serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan yang lebih layak.
- d. Melanjutkan dan mengirim pelatihan peserta diklat peningkatan kemampuan dan profesionalan guru dan kepala sekolah.
- e. Melaksanakan studi banding Kepala Sekolah ke luar kota atau keluar negeri.
- f. Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta kualitas sarana dan prasarana untuk menciptakan lulusan dan sumber daya manusia yang berkualitas guna menghadapi persaingan globalisasi, lingkungan sosial dan menghadapi persaingan tenaga kerja dari dalam maupun luar negeri.**

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar, selain profesionalisme guru yang menjadi tombak terwujudnya upaya tersebut namun kualitas sarana dan prasarana juga termasuk hal itu yang harus terpenuhi dalam upaya penyelenggaraan peningkatan kualitas pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang berkualitas dan mampu berkompetensi dan bersaing dengan tenaga luar maupun dalam negeri. Dalam meningkatkan kualitas mutu kelulusan sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki implementasi strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah sekolah dan unsur didalamnya TK,SD,SLTP, dan SMU yang ada diKota Yogyakarta.
- b. Penggabungan sekolah khusus SD negeri yang berdekatan dan

- c. Mengutamakan sekolah dalam rangka untuk mendapatkan bantuan rehabilitas.
 - d. Melaksanaan pengelolaan SLTP,SMU biasa menjadi SLTP, SMU binaan dan unggulan.
 - e. Memberikan bantuan/ subsidi bagi sekolah swasta.
 - f. Melaksanaan penggunaan ruang laboraturium dan ruang serba guna sekolah.
- c. Meminimalkan jumlah tenaga pendidik yang kurang berkualitas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan.**

Dengan mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan secara efektif dan efisien, pemerintah Kota Yogyakarta hal tersebut dapat meminimalkan jumlah tenaga kerja pendidik yang kurang berkualitas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melakukan kegiatan operasional antara lain:

- a. Pemberian honorium Guru Kontrak/Guru Honor setiap jenis dan jenjang.
- b. Meningkatkan kualifikasi dari berkualifikasi SPG atau sederajat menjadi berkualifikasi D-II atau D-II menjadi D-III melalui program izin dan tugas belajar, serta memberikan kesempatan untuk

- c. Meningkatkan jumlah sekolah dan unsure didalamnya TK,SD, SLTP, dan SMU yang ada di kota Yogyakarta.
 - d. Memperbaiki ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak.
 - e. Mengefektifkan pelaksanaan tertib administrasi gedung dan barang daerah.
 - f. Pengadaan perumahan dinas karyawan pendidikan, perpustakaan, ruang serva guna, ruang laboraturium, alat komunikasi dan internet serta perawat secara continiu.
 - g. Menambah dan memanfaatkan buku-buku pelajaran pokok, buku-buku penunjang, buku-buku perpustakaan, alat-alat peragaan dan laboraturium
- d. Mengatasi rendahnya kualitas tenaga pendidikan dengan memanfaatkan adanya beasiswa dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.**

Dalam upaya meningkatkan kualiatas pendidikan dasar di kota Yogyakarta, salah satu implementasi strategi yang dilakukan oleh Dinas kota Yogyakarta adalah mengatasi rendahnya kualitas tenaga pendidikan dengan memanfaatkan adanya beasiswa dan komitmen yang tinggi dari pemerintah Kota Yogyakarta dengan melaksanakan kegiatan operasisonal sebagai berikut:

- b. Pengadaan pelatihan guru melalui pelatihan teknis fungsional Guru Management Skill Training (MST) dan Workshop bagi Kepala Sekolah.
- c. Memenuhi kebutuhan guru SD.
- d. Melanjutkan dan mengirim pelatihan peserta diklat peningkatan kemampuan dan keprofesionalan guru dan kepala sekolah.⁵⁶

1. Tujuan dan Sasaran Implementasi Kebijakan

Dari hasil pengelompokan implementasi kebijakan dapat diambil masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang diperlukan dalam melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kota Yogyakarta.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pendidikan yang berkualitas.
- b. Mewujudkan adanya pengelolaan dana yang efektif, efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas public yang tinggi pada setiap lembaga pendidikan.

⁵⁶ RPJM Kota Yogyakarta tahun 2007-2011

- c. Mewujudkan adanya output pendidikan yang berkualitas yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan, keunggulan, kemandirian serta kompetitif.
- d. Mengoptimalkan serta melengkapi sarana prasarana pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda menuju standar pelayanan minimum.
- e. Melaksanakan inovasi pembelajaran dengan multimedia serta multi metode menuju terlaksananya sistem pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kreatifitas siswa.

Sasaran strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kota Yogyakarta adalah:

- a. Terwujudnya kualitas sumber daya tenaga pendidikan yang berkualitas.
- b. Terwujudnya kualitas output pendidikan yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan,keunggulan,kemandirian serta kompetitif dipasar global.
- c. Terlaksananya manajemen keuangan yang efektif, efisien serta memiliki akuntabilitas public yang tinggi disemua lembaga pendidikan.
- d. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar pelayanan prima.

- e. Terlaksananya sistem pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan multimedia dan multi metode serta inovasi baru